

# PERKEMBANGAN INDEKS GINI DI PROPINSI DATI I JAWA BARAT

*Sutyastie Soemitro Remi\**

## Abstract

*The problem of inequality in income distribution has for long been a focus of research interest. There is also a high possibility that this problem is responsible for the social stress and disturbances. In order to address this issue, there is a need to approach it through the gini index both over time and between regions, rural-urban, and also between groups in order to get an empirical observation, particularly in provincial level of Java. We can draw a general conclusion that the inequality in income distribution in West Java is low. In this connection, there is a tendency that the degree of inequality is high in areas the middle of development is relatively higher and then in urban areas. Thus, development policies aimed at improving on community income distribution should therefore, prioritize these areas.*

## Pendahuluan

Melalui Indeks Gini (IG), distribusi pendapatan relatif bagi penduduk secara keseluruhan dapat dinyatakan dengan satu angka saja. Meskipun demikian, IG mempunyai beberapa kelemahan yaitu: (1) indeks tersebut tidak peka terhadap perubahan-perubahan yang kecil, tetapi penting dalam penyebaran; (2) indeks tersebut memperlakukan perbedaan-perbedaan absolut secara sama rata dengan tidak mempedulikan di

mana timbulnya dalam spektrum pendapatan: umpamanya pendapatan Rp 10.000,00 di antara yang berpendapatan tinggi diberikan bobot yang sama dengan penerima berpendapatan rendah; (3) indeks tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai rata-rata yang dipilih untuk kelompok pendapatan yang teratas (lihat Dwight Y. King dan Peter D. Weldon, EKI, 1975).

---

\* Dr. Sutyastie Soemitro Remi, S.E., M.S. adalah pengajar dan peneliti pada Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran; dan Kepala Pusat Penelitian Kependudukan (PPK), Universitas Padjadjaran.

Kendati ada berbagai kelemahan di atas, penggunaan IG dalam penelitian-penelitian telah demikian meluas karena kemudahan dan manfaatnya. Untuk itu, tulisan ini memanfaatkan pula alat-alat ukur distribusi pendapatan yang lain; dimaksudkan agar pengendalian pada sekumpulan ukuran akan memberikan dasar yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pengendalian pada hanya satu ukuran. Di samping itu, perlu pula diungkapkan bahwa perhitungan IG atas dasar data pengeluaran juga memiliki kelemahan sebagai proksi pendapatan yakni akan menghasilkan angka IG yang lebih kecil bila dibandingkan dengan data dasar dari pendapatan.

Alat pengukur IG ini dapat memberikan gambaran kepada kita perihal derajat/kadar ketidakmerataan (kepincangan atau disparitas) pendapatan/pengeluaran konsumsi, baik antarwilayah (wilayah pembangunan), antarperkotaan-pedesaan, antarwaktu, maupun antargolongan/kelompok penduduk (penduduk berpendapatan terendah, menengah, dan tertinggi). Indeks Gini berada antara angka "0" dan "1" yang masing-masing menunjukkan "pemerataan yang ideal" dan "ketidakmerataan yang ekstrim". Jadi, makin besar IG, makin tidak merata distribusi pendapatannya, dan sebaliknya, makin kecil indeks, makin kurang ketidakmerataan pendapatan atau

makin merata. Melalui analisis perkembangan indeks gini, tulisan ini menjelaskan distribusi pendapatan relatif bagi penduduk di Propinsi Dati I Jawa Barat.

### **Indeks Gini Antarwaktu**

Gambaran faktual perkembangan tentang pemerataan distribusi pendapatan di Jawa Barat melalui pendekatan indeks gini dapat dilihat pada Tabel 1. Dari angka IG pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa distribusi pendapatan rumah tangga di Jawa Barat sejak 1980 hingga 1996 menunjukkan ketimpangan "ringan" karena berada pada angka di bawah 0,4. Bila IG antara 0,4-0,5, tergolong ketimpangan "sedang" dan jika lebih dari 0,5 tergolong ketimpangan "berat" (lihat Felix Paukert, Hari Oshima, 1974). Meskipun demikian, dalam

**Tabel 1**  
**Perkembangan Indeks Gini**  
**di Propinsi Dati I Jawa Barat**

Tahun	Indeks Gini
1990	0,303
1981	0,297
1984	0,303
1987	0,299
1990	0,315
1993	0,309
1995	0,299
1996	0,340

Sumber: Kantor Statistik Jawa Barat, berbagai edisi

periode 16 tahun tersebut terjadi proses turun naik ketimpangan distribusi pendapatan, yang apabila ditarik garis kecenderungannya menunjukkan adanya tendensi ketimpangan distribusi pendapatan yang memburuk (dari 0,303 pada 1980 meningkat menjadi 0,340 pada tahun 1996). Perkembangan sejak tahun 1980-1995 hampir bisa dikatakan konstan, baru terjadi perubahan berarti pada tahun 1995-1996.

Beberapa penelitian tentang distribusi pendapatan yang telah dikerjakan para peneliti sebelumnya juga menunjukkan adanya distribusi pendapatan yang semakin terpusat pada kelompok/elite tertentu. Hal ini dianggap sesuatu yang wajar terjadi di tengah masyarakat/negara yang sedang membangun; dikenal dengan adanya "U shaped" terbalik, yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, untuk kemudian sampai dengan titik tertentu ketimpangan tersebut akan menurun (Simon Kuznets, 1962).

Peningkatan/penurunan Indeks Gini akan dipengaruhi oleh adanya kesenjangan pemerataan pendapatan antargolongan/penduduk, antarsektor, dan antarwilayah.

Pergeseran angka Indeks Gini Jawa Barat yang semakin meningkat inemperlihatkan adanya pergeseran ke arah penurunan

pemerataan. Pada dasarnya hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Hal ini bukan berarti bahwa kita harus menghambat percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh SDM yang tinggi karena mereka juga merupakan penyumbang terbesar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Upaya yang harus dilakukan tentunya lebih diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM serta memberikan perlindungan dengan kebijakan yang protektif.

## **Indeks Gini Antarwilayah**

### **a. Indeks Gini Antardati II di Jawa Barat**

Dalam uraian di bawah ini diutarakan perbedaan IG berdasarkan pada daerah Dati II dan perbedaan IG antarwilayah pembangunan serta antara perkotaan-pedesaan.

Perbedaan distribusi pendapatan antardaerah ditunjukkan oleh nilai IG setiap daerah tingkat II yang ada di Jawa Barat, yang didasarkan pada perhitungan tahun 1993 dan tahun 1995. Hal ini

disebabkan ketersediaan data masih terbatas. Indeks Gini tersebut diperlihatkan pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa jika hanya mengandalkan angka-angka tahun 1993-1995, telah terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan di Jawa Barat, yang ditunjukkan dengan IG dari 0,309 menjadi 0,299, kendati sangat kecil perubahannya. Pada tahun berikutnya (1996) perubahan ketimpangan distribusi pendapatan dari tahun 1995 ke 1996 sangat mencolok dan berlawanan dengan periode satu tahun sebelumnya.

Dengan kondisi ketimpangan di Jawa Barat yang relatif tidak banyak berubah dari 1993-1995 secara rata-rata, ternyata bila dicermati, IG setiap Dati II menunjukkan beberapa gambaran yang menarik. Paling tidak diperoleh empat karakteristik yaitu: (1) ketimpangan membaik dengan perubahan yang kecil; (2) ketimpangan membaik dengan perubahan yang cukup berarti; (3) ketimpangan memburuk dengan perubahan kecil, dan (4) ketimpangan memburuk dengan perubahan yang cukup berarti. Yang termasuk kategori (1) meliputi 13 Dati II yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Cianjur, Garut, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Karawang, Bekasi, Tangerang, Serang, dan Kotamadya Bogor. Sementara itu, yang tergolong kategori (2) terdiri

dari 5 Dati II yaitu Kabupaten Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Indramayu, dan Subang. Di pihak lain, kabupaten-kabupaten yang termasuk kategori (3) sebanyak 5 Dati II yaitu Majalengka, Purwakarta, Kotamadya Bandung, dan Kotamadya Cirebon. Selebihnya ada 2 Dati II yang termasuk golongan (4) yaitu Kabupaten Cirebon dan Kotamadya

**Tabel 2**  
**Indeks Gini antar-Dati II**  
**di Propinsi Dati I Jawa Barat, 1993-1995**

Kabupaten/Kotamadya	Indeks Gini	
	1993	1995
Kabupaten Pandeglang	0,235	0,224
Kabupaten Lebak	0,224	0,222
Kabupaten Bogor	0,328	0,266
Kabupaten Sukabumi	0,266	0,250
Kabupaten Cianjur	0,266	0,242
Kabupaten Bandung	0,324	0,277
Kabupaten Garut	0,269	0,259
Kabupaten Tasikmalaya	0,246	0,219
Kabupaten Ciamis	0,270	0,254
Kabupaten Kuningan	0,234	0,213
Kabupaten Cirebon	0,192	0,226
Kabupaten Majalengka	0,215	0,221
Kabupaten Sumedang	0,244	0,224
Kabupaten Indramayu	0,278	0,222
Kabupaten Subang	0,266	0,216
Kabupaten Purwakarta	0,215	0,223
Kabupaten Karawang	0,245	0,225
Kabupaten Bekasi	0,271	0,244
Kabupaten Tangerang	0,328	0,326
Kabupaten Serang	0,327	0,300
Kotamadya Bogor	0,312	0,299
Kotamadya Sukabumi	0,206	0,249
Kotamadya Bandung	0,305	0,311
Kotamadya Cirebon	0,312	0,319
Kotamadya Tangerang	-	0,297
<b>JAWA BARAT</b>	<b>0,309</b>	<b>0,299</b>

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat, Data diolah kembali

Sukabumi. Dengan demikian, lebih dari 70% Dati II menunjukkan distribusi pendapatan yang membaik, dan hanya 8% Dati II yang memburuk distribusinya.

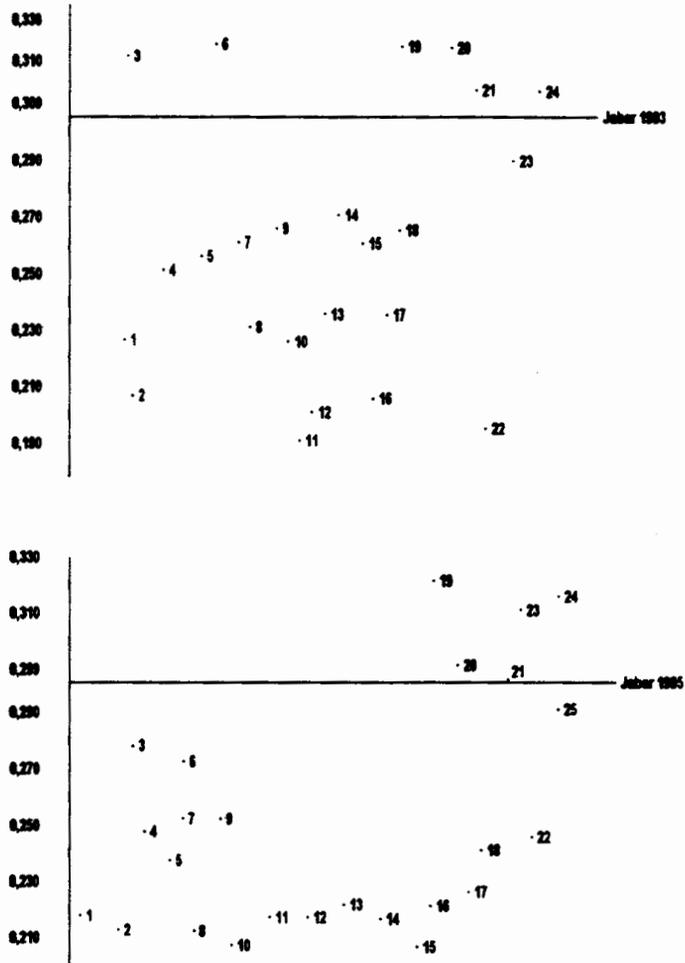
Bila dilihat IG-nya, kedua daerah ini mencerminkan kondisi distribusi pendapatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angka IG Jawa Barat. Maka dari itu, analisisnya perlu dikombinasikan dengan analisis berikut yang berusaha memosisikan Dati II dimaksud apakah berada di bawah atau di atas IG Jawa Barat, yang berarti lebih baik/buruk daripada distribusi secara keseluruhan di Jawa Barat. Untuk lebih cepat dan mudah diketahui akan disajikan dalam bentuk Grafik 1.

Dari Grafik 1 terlihat dengan mudah bahwa pada tahun 1993 terdapat 7 Dati II yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan lebih buruk daripada Jawa Barat secara keseluruhan yaitu kabupaten-kabupaten: Bogor, Bandung, Tangerang, Serang, dan kotamadya-kotamadya: Bogor, Cirebon, dan Bandung. Selebihnya, 17 Dati II lainnya lebih baik distribusinya. Kemudian pada tahun 1995 terdapat 4 Dati II yang lebih buruk kondisinya daripada Jawa Barat secara keseluruhan yaitu 2 kabupaten (Tangerang dan Serang) dan 2 kotamadya (Bandung dan Cirebon).

## **b. Indeks Gini Antarwilayah Pembangunan**

Di antara ketiga wilayah pembangunan di Jawa Barat, wilayah pembangunan timur mempunyai kadar ketidakmerataan yang relatif rendah atau yang paling baik distribusi pendapatannya, yang ditunjukkan oleh IG yaitu sebesar 0,252 pada tahun 1993 dan pada tahun 1995 turun menjadi 0,242. Begitu pula halnya wilayah pembangunan barat juga terlihat sama kondisinya dengan wilayah pembangunan timur yaitu mengalami penurunan ketidakmerataan dari 0,262 pada tahun 1993 menjadi 0,249 pada tahun 1995 (Tabel 3). Lain halnya dengan wilayah pembangunan tengah, di samping memperlihatkan kadar ketidakmerataan yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan kedua wilayah pembangunan lainnya, juga memperlihatkan ketidakmerataan yang cenderung meningkat yaitu sebesar 0,275 pada tahun 1993 dan pada tahun 1995 sebesar 0,282. Hal ini menandakan bahwa di wilayah pembangunan tengah dalam kurun waktu 2 tahun terjadi ketimpangan pemerataan distribusi pendapatan yang lebih besar.

Grafik 1.  
Perkembangan Indeks Gini per Dati II dan Jawa Barat, 1993 dan 1995



Keterangan:

- |                    |                     |                     |                     |                    |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Kab. Pandeglang | 6. Kab. Bandung     | 11. Kab. Cirebon    | 16. Kab. Purwakarta | 21. Kod. Bogor     |
| 2. Kab. Lebak      | 7. Kab. Garut       | 12. Kab. Majalengka | 17. Kab. Karawang   | 22. Kod. Sukabumi  |
| 3. Kab. Bogor      | 8. Kab. Tasikmalaya | 13. Kab. Sumedang   | 18. Kab. Bekasi     | 23. Kod. Bandung   |
| 4. Kab. Sukabumi   | 9. Kab. Ciamis      | 14. Kab. Indramayu  | 19. Kab. Tangerang  | 24. Kod. Cirebon   |
| 5. Kab. Cianjur    | 10. Kab. Kuningan   | 15. Kab. Subang     | 20. Kab. Serang     | 25. Kod. Tangerang |

**Tabel 3**  
**Indeks Gini Antarwilayah Pembangunan**  
**di Propinsi Dati I Jawa Barat, 1995 dan 1995**

Wilayah Pembangunan	1993	1995
Wilbang Barat	0,262	0,249
Wilbang Tengah	0,275	0,282
Wilbang Timur	0,252	0,242
Jawa Barat	0,309	0,299

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (Data Diolah Kembali)

### c. Indeks Gini Antarperkotaan dan Pedesaan

Pada umumnya besaran IG perkotaan di suatu wilayah lebih besar daripada besaran IG pedesaan di wilayah bersangkutan. Hal ini berarti bahwa kadar ketidakmerataan di perkotaan relatif lebih besar daripada kadar ketidakmerataan di pedesaan. Kondisi umum ini juga tampak jelas dari besaran IG pada tingkat Jawa Barat. IG di perkotaan sebesar 0,295 pada tahun 1993 dan 0,292 pada tahun 1995, sedangkan di pedesaan sebesar 0,254 pada tahun 1993 dan 0,236 pada tahun 1995. Dengan demikian, baik di perkotaan maupun di pedesaan Jawa Barat terlihat adanya perbaikan distribusi pendapatan. Perbaikan lebih cepat terjadi di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan.

### Pembagian Pendapatan Antargolongan

Distribusi pendapatan penduduk/rumah tangga di Jawa Barat yang dibagi ke dalam tiga bagian yaitu 40% berpendapatan rendah, 40% berpendapatan sedang, dan 20% berpendapatan tinggi tampaknya tidaklah mengalami perubahan proporsi yang berarti dari tahun 1980 hingga 1995. Jika pada tahun 1980 kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 21,92%, pada tahun 1995 telah meningkat sedikit persentasenya menjadi 22,15%. Kendati demikian, perkembangannya menunjukkan ke arah yang lebih baik. Bank Dunia menentukan standar bahwa jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima minimum 17% dari GNP suatu negara, hal itu termasuk "ketimpangan ringan". Yang berarti bahwa posisi Jawa Barat telah jauh lebih baik atau jauh di atas standar penetapan Bank Dunia, terlebih lagi bila peningkatan porsi 40% penduduk berpendapatan rendah ini memperoleh tambahan porsi yang berasal dari golongan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Hal ini didukung data bahwa porsi 20% penduduk Jawa Barat yang berpendapatan tinggi, yang pada tahun 1980 menerima 40,05% menurun sedikit pada tahun 1995 menjadi 39,70%.

**Tabel 4**  
**Koefisien Gini Antarperkotaan dan**  
**Pedesaan di Propinsi Dati I Jawa Barat,**  
**1995 dan 1995**

Uraian	1993	1995
Perkotaan	0,295	0,292
Pedesaan	0,284	0,238
Jawa Barat	0,309	0,299

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (Data Diolah Kembali)

Memperhatikan rangkaian angka-angka dari Tabel 5 tersebut timbul pertanyaan, mengapa waktu 15 tahun dengan berbagai kebijakan yang telah dilahirkan, yang berupaya memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan seolah-olah tidak mempunyai arti dan tidak mampu mengubah sama sekali pola distribusi

**Tabel 5**  
**Distribusi Pembagian Pendapatan**  
**Antargolongan di Propinsi Dati I Jawa**  
**Barat, 1980-1995**

Tahun	Distribusi Pembagian Total Pendapatan		
	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi
1980	21,92	38,63	40,05
1981	22,27	37,95	39,78
1984	23,15	35,63	40,23
1990	22,45	35,51	41,94
1993	21,51	37,38	40,51
1995	22,15	38,15	39,70

Sumber: BPS, berbagai laporan

pendapatan menurut ketiga golongan tersebut.

Penelitian Dwight Y. King dan Peter Weldon di Indonesia (Jawa) menghasilkan kesimpulan bahwa sedikit sekali terjadi perubahan distribusi pendapatan antara tahun 1963-1970. Di perkotaan terlihat beberapa perubahan yang konsisten, yang memperlihatkan bahwa *trend* secara menyeluruh mengarah ke ketimpangan yang makin membesar dalam distribusi pendapatan. Daerah perkotaan ini paling tidak ditunjukkan oleh tiga kota besar yaitu Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Dengan demikian, terdapat konsistensi analisis data ini bahwa kendati dalam jangka waktu cukup panjang, distribusi pendapatan tidak mudah mengalami perubahan pola.

Pemilihan wilayah Jawa Barat ke dalam wilayah pembangunan (wilbang) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di wilbang timur menunjukkan pembagian yang lebih baik, 40% kelompok berpendapatan rendah menerima sebesar 25,25%. Sementara itu, di wilbang barat sebesar 24,49% dan di wilbang tengah paling kecil yaitu 23,98%. Meskipun demikian, posisi di tiga wilbang tersebut masih lebih baik daripada posisi di Jawa Barat secara keseluruhan (lihat Tabel 6). Dari tabel yang sama terlihat ada pembagian yang membaik bagi 40% golongan berpendapatan rendah untuk wilbang tengah dan timur, tetapi

**Tabel 6**  
**Persentase Pembagian Total Pendapatan per Kapita**  
**menurut Dati II dan Wilbang di Propinsi Dati I Jawa Barat**

Kabupaten/Kotamadya	Distribusi Pembagian Pendapatan Tahun 1993			Distribusi Pembagian Pendapatan Tahun 1995		
	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi
<b>Wilbang Barat:</b>						
Pandeglang	26,01	38,72	35,27	25,82	39,71	34,47
Lebak	27,36	37,93	34,71	25,72	41,11	33,17
Berang	21,33	35,59	42,08	21,94	38,57	38,49
Rata-rata	24,90	37,75	37,35	24,49	38,80	35,71
<b>Wilbang Tengah:</b>						
Bogor	21,26	35,05	42,69	22,96	35,65	35,40
Sukabumi	24,46	39,17	38,37	24,22	40,89	34,89
Cianjur	25,11	36,71	38,18	25,76	38,90	35,35
Bandung	21,33	36,20	42,47	23,80	33,12	33,06
Sumedang	24,22	41,50	34,28	25,95	38,90	35,15
Subang	23,49	40,28	36,23	26,10	39,92	33,98
Purwakarta	25,24	43,06	31,70	25,23	41,95	32,82
Karawang	24,51	41,36	34,13	25,82	39,40	34,78
Bekasi	23,67	38,32	33,01	25,67	37,80	39,56
Tangerang	19,93	37,97	42,10	20,79	33,78	41,40
Kodya Bogor	21,72	35,57	40,53	21,66	39,07	39,56
Kodya Sukabumi	27,12	40,24	32,64	24,78	33,57	36,15
Kodya Bandung	21,94	33,31	39,75	21,17	33,57	40,25
Kodya Tangerang	-	-	-	21,79	38,42	39,79
Rata-rata	23,38	33,98	37,62	23,98	39,20	36,90
<b>Wilbang Timur</b>						
Garut	24,02	39,29	36,69	24,11	39,09	36,79
Tasikmalaya	25,59	38,21	36,20	26,68	39,45	33,87
Ciamis	23,32	39,61	37,07	24,23	40,12	35,65
Kuningan	22,50	43,83	38,67	26,67	39,80	33,53
Cirebon	28,58	39,39	32,03	26,07	40,10	33,83
Majalengka	26,15	40,67	38,18	26,26	40,27	33,47
Indramayu	24,34	37,09	38,57	25,86	39,40	34,73
Kodya Cirebon	21,31	38,66	40,03	22,19	36,19	41,63
Rata-rata	24,48	39,59	35,93	25,26	39,30	35,44
Propinsi Dati I Jawa Barat	21,51	37,88	40,61	22,15	38,16	39,70

Sumber: Hasil Pengolahan

**Tabel 7**  
**Persentase Pembagian Total Pendapatan per Kapita**  
**menurut Dati II dan Kota-Desa di Propinsi Dati I Jawa Barat**

Kabupaten/Kotamadya	Distribusi Pembagian Pendapatan Tahun 1993			Distribusi Pembagian Pendapatan Tahun 1995		
	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi
<b>Kota:</b>						
Bogor	21,26	38,05	42,69	22,96	39,65	38,40
Tangerang	19,93	37,97	42,10	20,79	37,60	41,40
Bekasi	23,67	38,32	38,01	25,67	39,39	35,93
Kodya Bogor	21,72	37,57	40,53	21,08	37,76	39,56
Kodya Sukabumi	27,12	40,24	32,64	24,76	39,07	35,15
Kodya Bandung	21,94	38,31	39,75	21,17	38,57	40,25
Kodya Tangerang	-	-	-	21,79	33,42	39,79
Kodya Cirebon	21,31	38,08	40,02	22,19	38,19	41,63
<b>Rata-rata</b>	<b>22,42</b>	<b>39,16</b>	<b>39,39</b>	<b>22,83</b>	<b>33,36</b>	<b>39,14</b>
<b>Desa:</b>						
Pandeglang	25,01	38,72	38,27	25,62	39,71	34,47
Lebak	27,38	37,93	34,71	25,72	41,11	33,17
Serang	21,33	35,59	42,08	21,94	38,57	39,49
Sukabumi	24,40	39,17	35,37	24,22	40,69	34,69
Cianjur	25,11	38,71	38,16	25,76	33,90	35,35
Bandung	21,33	38,20	42,47	23,83	33,12	38,06
Sumedang	24,22	41,59	34,26	25,95	38,90	35,15
Subang	23,49	40,26	38,23	26,10	39,92	33,96
Purwakarta	25,24	43,09	31,70	25,23	41,95	32,82
Karawang	24,51	41,36	34,13	25,62	39,40	34,76
Garut	24,02	39,20	38,69	24,11	39,09	38,79
Tasikmalaya	25,59	38,21	38,20	25,83	39,45	33,67
Ciamis	23,32	39,61	37,07	24,23	40,12	33,65
Kuningan	22,50	43,83	33,67	25,67	39,60	33,53
Cirebon	38,38	39,39	32,83	26,07	40,10	33,83
Majalengka	25,15	40,67	38,16	26,26	40,27	39,47
Indramayu	24,34	37,09	38,57	25,66	39,40	34,73
<b>Rata-rata</b>	<b>25,43</b>	<b>39,39</b>	<b>38,05</b>	<b>26,30</b>	<b>37,14</b>	<b>34,94</b>
<b>Propinsi Dati I Jawa Barat</b>	<b>21,51</b>	<b>37,38</b>	<b>40,61</b>	<b>22,15</b>	<b>38,16</b>	<b>39,70</b>

Sumber: Hasil Pengolahan

tidak berlaku untuk wilbang barat bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1993.

Guna mengetahui pola distribusi pendapatan kota-desa, kedua puluh lima Dati II dipilah ke dalam dua kategori. Dengan asumsi ada 8 Dati II yang tergolong kota (lihat Tabel 7), terlihat bahwa pada tahun 1993 distribusi pendapatan di desa lebih baik karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima 25,43%, sementara rekannya di kota menerima 22,42% dari total pendapatan. Demikian pula, 40% masyarakat berpendapatan rendah di desa pada tahun 1995 menerima bagian lebih besar (28,30%) daripada golongan yang sama di kota dan hanya sedikit mengalami perbaikan dengan mendapatkan bagian yaitu sebesar 22,63%. Jika pembagian wilayah kota-desa

tersebut representatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat pedesaan memperoleh pembagian pendapatan yang lebih baik daripada masyarakat perkotaan.

### Penutup

Berdasarkan analisis perkembangan indeks gini yang telah dipaparkan di muka, secara umum dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Barat tergolong ringan. Kendati demikian, ada tendensi derajat ketimpangan meningkat di wilayah pembangunan bagian tengah dan di perkotaan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat layak diprioritaskan di wilayah-wilayah tersebut.

### Referensi

- Booth, Anne dan Peter Mc. Cawley. 1982. *Ekonomi orde baru*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Ekonomi pembangunan: sebuah survey*. 1995. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Indonesia, Biro Pusat Statistik. 1983. *Tingkat perkembangan distribusi rumah tangga 1976-1978*. Jakarta.
- Indonesia. Biro Pusat Statistik. 1993. *Susenas III, V*. Jakarta.
- J.S. Uppal. 1985. "Income distribution, poverty, and economic growth in Indonesia", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 32(3): 319-347.
- Jawa Barat. Kantor Statistik Propinsi. 1993. *Pendapatan regional Jawa Barat*. Bandung.

- Jawa Barat. Pemerintah Daerah. 1997. *Pilar-pilar pemberdayaan masyarakat Jawa*. Bandung.
- Sawit, M. Husein . 1985. "Status penguasaan tanah di usaha tani padi dan implikasi ekonominya: sebuah studi di pedesaan Jawa Barat", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 33(1): 29-46.
- Sigit, Hananto. 1997. *Kemiskinan dan ketimpangan, pembagian pendapatan dalam pembangunan ekonomi Indonesia: mencari paradigma baru pembangunan Indonesia*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Soesastro, M. Hadi. 1990. "Pembentukan modal dan pemerataan", *Analisis CSIS*, 19(2).